



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 6605-6614

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Peningkatan Produktivitas Bumdes Desa Cijujung Kabupaten Bogor Jawa Barat

Fatimah Rizkyanti Kusuma^{1✉}, Dadan Kurniansyah², Evi Priyanti³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: fatimahrizkya01@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kesejahteraan rakyat sangat penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di segala bidang seperti ekonomi, masyarakat dan politik. Namun kesejahteraan masyarakat desa masih tergolong rendah dan situasi ekonomi masih berkembang, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia perlu lebih ditingkatkan dengan pemberdayaan daerah. Pemberdayaan daerah membutuhkan waktu lebih lama daripada perpajakan, dan pemberdayaan BUMN berpotensi mengatasi permasalahan baru dan struktural yang melanda perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan sudah sewajarnya menjadi prioritas utama dari semua kebijakan dan rencana strategis pembangunan di Indonesia. Jika tidak, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan akan semakin besar, terutama di bidang ekonomi. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa desa adalah desa dan desa adat atau nama lain yang selanjutnya disebut desa, dan itu sah. Kesatuan masyarakat dengan batas wilayah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Republik Indonesia. Prinsip dasar pemerintahan desa adalah keberagaman partisipasi, otonomi sejati, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, setiap desa harus membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kata Kunci: *BUMDes, Produktivitas, Desa Cijujung*

Abstrack

The welfare of the people is very important to improve people's lives in all areas such as economy, society and politics. However, the welfare of rural communities is still relatively low and the economic situation is still developing, so the welfare of the Indonesian people needs to be further improved by empowering the regions. Regional empowerment takes longer than taxation, and empowering BUMN has the potential to overcome new and structural problems that hit the Indonesian economy. Therefore, rural development should naturally be the main priority of all policies and strategic development plans in Indonesia. Otherwise, the gap between urban and rural areas will be even greater, especially in the economic sector. Meanwhile, according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 1 paragraph 1 stipulates that villages are villages and traditional villages or other names hereinafter referred to as villages, and that is legitimate. The unity of society with territorial boundaries has the right to regulate and manage government affairs. The interests of local communities based on community initiatives, original rights and/or traditional rights are recognized and respected in the government system of the unitary state of the Republic of Indonesia. The basic principles of village government are diversity of participation, true autonomy, democracy and community empowerment. Meanwhile, what is meant by community empowerment is that in order to achieve community welfare, each village must form a Village-Owned Enterprise (BUMDes).

Keyword: *Village –owned enterprise, productivity, Cijujung Village*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada bidang ekonomi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan potensi desa, sebagai salah satu Lembaga yang beroperasi di pedesaan BUMDes tentu saja harus memiliki perbedaan dari Lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tingkat efektifitas dari BUMDes ini sendiri memberikan perkembangan yang signifikan terhadap perekonomian desa. Segala sumber daya yang ada di desa haruslah dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri, begitu juga aset-aset ekonomi di pedesaan, hal ini ditujukan agar kegiatan perekonomian di desa ini dapat bergerak dimana seperti fungsi dari BUMDes ini juga merupakan institusi yang menjadi penggerak bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini masyarakat merupakan pemeran utama dari berjalannya BUMDes, karena pengelolaan BUMDes harus dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang dimana harus memiliki semangat kebersamaan dan tanggung jawab dari diri sendiri. Seiring berjalannya waktu BUMDes ini juga akan berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli desa, seperti yang telah tertera dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana dana dari BUMDes itu sendiri bisa di dapat dari Alokasi dana desa dan dana dari usaha itu sendiri. Jika BUMDes dapat berjalan dengan baik, maka pendapatan hasil desa

pun juga akan meningkat, dan proses pembangunan serta kesejahteraan ekonomi dapat diselenggarakan dengan cepat dan tepat. Namun dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan perhatian lebih terhadap pengelolaan BUMDes itu sendiri.

Dalam praktek di lapangannya BUMDes Desa Cijujung kurang berdampak bagi kesejahteraan masyarakatnya, hal tersebut dikarenakan kurangnya konsistensi dari pelaksana BUMDes itu sendiri dan keadaan Pandemi *Covid-19* yang mulai masuk ke Indonesia semenjak tahun 2020. Selain itu partisipasi masyarakat yang kurang mengenai BUMDes ini diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait BUMDes serta kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat akan berbisnis atau berwirausaha. Bentuk usaha BUMDes yang ada pun tidak bersifat tetap dan hanya mengikuti *trend* saja, hal itu pula yang menyebabkan BUMDes Desa Cijujung bisa di bilang dalam keadaan jalan ditempat. Jika hal ini terus berlanjut BUMDes yang fungsinya awalnya mensejahterakan perekonomian masyarakat malah semakin terpuruk dan tidak menimbulkan dampak apapun bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak. (Sugiyono, 2014:9)

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat Kelurahan Sukamaju, sehingga kita dapat mengetahui apakah penerapan protokol kesehatan pada warga dalam kehidupan sehari – hari berjalan atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum lokasi penelitian

Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor merupakan sebuah desa yang berada di tengah – tengah kota. Desa ini memiliki luas wilayah 365,41 Ha dengan batas disebelah Barat Desa Cimandala Kecamatan Cibinong, batas di sebelah timur Desa

Kadumangu kecamatan Sukaraja, sebelah selatan desa Pasirlaja kecamatan Sukaraja dan di sebelah selatan Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Bogor. Desa Cijujung juga dikenal dengan usaha pengolahan tepung tapioca nya, usaha ini berkembang semenjak puluhan tahun lamanya dan dikembangkan menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kualitas yang terus dijaga, maka dari itu Desa Cijujung sudah berhasil membawa nama baik Bumi Tegar Beriman ini ke kancah Nasional dengan predikat UMKM Terbaik tingkat Nasional.

BUMDEs Desa Cijujung

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disingkat BUMDEs sudah terbentuk lama di Desa Cijujung, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa desa adalah desa dan desa adat atau nama lain yang selanjutnya disebut desa, dan itu sah. Kesatuan masyarakat dengan batas wilayah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Republik Indonesia. BUMDEs merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Badan Usaha Milik Desa Cijujung ini berdiri semenjak tahun 2014 dan diberi nama "Mitra Saluyu" Mitra diambil dari Bahasa Indonesia yang berarti rekan dan Saluyu diambil dari Bahasa Sunda yang berarti sejalan, dengan dipilihnya nama Mitra Saluyu ini anggota BUMDEs berharap BUMDEs ini dapat menjadi jalan keluar yang selalu sejalan dan berdampingan dengan seluruh lapisan masyarakat demi kesejahteraan perekonomian masyarakat itu sendiri.

Dalam menjalankan BUMDEs tentunya harus ada anggota – anggota yang terlibat demi keberlangsungannya, dalam hal ini BUMDEs desa cijujung telah memiliki struktur organisasi BUMDES yang telah dipilih oleh BPD dan masyarakat, sebagai berikut;

Pengawas	Ketua	Ketua BPD Cijujung
	Wakil Ketua	Ketua LPMD Cijujung
	Sekretaris	Wahyu Wismanto Hadi
	Anggota	Hermin S.H
Penasehat		Kepala Desa Cijujung
Ketua		Cucup Subari
Sekretaris		Arief Guntoro
Bendahara		Supri Hadinoto
Kepala Unit Usaha		
	Simpan Pinjam	Sujiono
		N. Sofiah
	UMKM	Edi Susila M
		Aditiya R

Upaya Peningkatan Produktivitas BUMDes Desa Cijujung

Hasil dari riset penelitian ini berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Desa Cijujung Bapak S.Timan, Ketua BUMDes Bapak Cucup Subari dan kepala Unit Usaha Perekonomian Lainnya mengenai Upaya Peningkatan Produktivita BUMDes .

BUMDes desa Cijujung ini sudah berjalan semenjak 2014 dengan berbagai jenis Usaha. Usaha yang pertama yaitu Usaha batu cincin karena sedang booming pada saat itu, selain memproduksi batu cincin usaha ini juga menyewakan alat untuk mengasah batu cincin, namun dalam pelaksanaannya batu cincin ini mengalami penurunan peminat lalu mulai tidak stabil dan akhirnya usaha nya ditutup.

Berikut pernyataan dari Bapak Cucup Subari selaku Ketua BUMDes Desa Cijujung :

" kesini kesini karena memang bqtu cincin sudah gak laku yq, sudah gak trend lagi ya akhirnya usahanya tutup" (wawancara peneliti, 2022)

Lalu karena usaha batu cincin yang tidak berhasil beralih ke usaha pembukaan *Caffe* yang terletak di Pinggir jalan Desa Cijujung. Setelah berjalan kurang lebih 5 tahun usaha *caffe* ini terpaksa tutup kembali karena sepi pengunjung hal ini juga di sebabkan kondisi Pandemi Covid-19.

Pernyataan tersebut diucapkan oleh Bapak S. Timan selaku Sekdes Cijujung :

" usahanya sudah berjalan eh kesini kesini ada pandemic yauda tutup, tutup lagi."

(wawancara peneliti, 2022).

Penerapan Upaya Peningkatan Produktivitas BUMDes Desa Cijujung

Peneliti menemukan selama pandemic ini BUMDEs desa Cijujung tidak lagi menjalankan usahanya baik di bidang apapun yang terakhir yaitu usaha *Caffe*, namun karena efek pandemic ini terpaksa tutup. Dari anggota organisasi BUMDEs tentunya sudah memiliki rencana untuk menghidupkan kembali BUMDEs desa Cijujung ini, banyak sekali rencana usaha yang akan dijalankan antara lain usaha isi ulang air mineral, bekerja sama dengan perusahaan perusahaan yang ada di desa Cijujung yaitu mengambil limbahnya untuk mengolah kembali hal ini dikemukakan oleh Sekdes desa Cijujung Bapak S.Timan.

Tentu saja dalam merealisasikan seluruh rencana tersebut pastinya ada regulasi perihal perizinan dan lain sebagainya, yang tidak mudah dan membutuhkan proses yang lama. Apalagi sekarang masih masa pandemic Covid-19. Beberapa perusahaan telah memiliki kerja sama dengan badan usaha lain yang juga ingin mengolah limbah tersebut namun diluar dari desa Cijujung itu sendiri, padahal pihak BUMDes sendiri sudah merencanakan hingga tingkat pemasaran produknya namun terkendala di Kerjasama antara pihak BUMDEs Desa Cijujung dengan perusahaan ini.

Bapak Aditya Rukmana selaku Kepala Unit Usaha Perekonomian Lainnya mengatakan bahwa :

" untuk ke pemasarannya pun sudah ada, yang mau nampung gitu tapi sampai saat ini masih terkendala begini, di perusahaan bidang itu disana sudah ada yang ngambil pihak luar."

(wawancara peneliti, 2022)

Sistem pelaksanaan usaha dari BUMDEs ini juga masih terhalang dikarenakan masih belum ada usaha tetap dari desa itu sendiri, lalu ditambah factor dari pandemic covid-19. Pengelola dari BUMDEs ini sendiri pun baru sampai ditahap merencanakan atau perencanaan saja sekaligus Menyusun strategi untuk melancarkan usaha kembali. Untuk eksekusi nya diperkirakan masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mengurus izin Kerjasama dan beberapa kontrak dari perusahaan yang belum habis.

Sistem pendanaan dari BUMDes sendiri diserahkan kepada pemerintah desa untuk penyertaan modalnya, pemerintah desa Cijujung menyertakan modal sebesar 118 juta terhitung dari 2014-2020 yang digunakan untuk pendirian usaha yang sudah disebutkan diatas yaitu antara lain pengolahan dan penjualan batu cincin, serta usaha *caffè*. Dalam pemberian modal BUMDes dapat menerima bantuan dana dari pihak ke 3 atau yang biasa disebut investor, namun modal yang diberikan tidak boleh melebihi dari modal yang

dianggarkan oleh pemerintah desa, karena hal itu pula usaha isi ulang air mineral masih dikaji kembali karena memerlukan dana yang cukup besar ucap Bapak S.Timan dalam wawancara. Terlebih lagi pada masa pandemi dana yang di dapatkan oleh pemerintah desa tidak bisa dialirkan langsung ke BUMDes melainkan harus dimaksimalkan untuk penanggulangan Covid-19.

Dalam pelaksanaannya pasti ada hambatan-hambatan yang berarti dalam hal ini BUMDes sendiri memiliki hambatan pada kurangnya partisipasi anggota BUMDes itu sendiri factor yang pertama yaitu menurunnya tingkat antusias dikarenakan focus yang sedang di fokuskan oleh pemerintahan desa yaitu penanggulangan covid-19, lalu aliran dana yang turun kepada BUMDes tidak bisa diturunkan maksimal oleh karena itu usaha yang telah direncanakan pun harus di tahan sementara sambil menunggu dana yang diperlukan mencukupi. Selain hambatan dari factor internal ada juga dari factor eksternal yaitu dari pihak perusahaan yang akan diajak bekerjasama masih memiliki Kerjasama dengan pihak luar. Selain itu factor dari kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai BUMDes ini

Berikut Pernyataan Bapak S.Timan selaku Sekdes Cijujung :

"karena di masyarakat kita ini belum booming lah ya, belum trend BUMDes ini jadi itu dianggapnya apasih BUMDes ini".(S.Timan dalam wawancara, 2022).

Hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintahan desa kepada masyarakat akan BUMDes ini.

Ketua BUMDes Bapak Cucup mengafirmasi pendapat Bapak S.timan :

"jadi kendala yang paling utama tuh belum ada bisnis tetap dari BUMDes ini lalu , tentang pengetahuan masyarakat mengenai BUMDes".

(Wawancara peneliti, 2022).

Dalam Penelitian ini pada kenyatannya BUMDes Desa Cijujung tidak mengalami kemajuan sama sekali semenjak didirikannya BUMDes ini, tujuan utama dari BUMDes yang semulanya didirikan untuk menopang kesejahteraan ekonomi masyarakat malah tidak berjalan dengan semestinya. Meskipun Kepala Daerah telah membuat kebijakan mengenai pelaksanaan BUMDes ini tetapi tetap saja dalam prakteknya masih sulit terlaksana. Kurangnya sosialisasi, yang menyebabkan kurangnya sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankannya, lalu respon dan sikap dari masyarakat serta kinerja dari struktur BUMDes itu sendiri, hal ini bersangkutan dengan teori George Edward III dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Communication (Komunikasi). Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan

perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Kondisi yang terjadi adalah adanya ketidakpahaman dari masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak desa mengenai BUMDes itu sendiri masyarakat jadi menganggap bahwa Badan Usaha tersebut merupakan Usaha Individu Kepala Desa yang ingin mengambil keuntungan dari masyarakat yang sebenarnya tidak, dari kebijakan yang dibuat BUMDes dibentuk untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri serta menambah pendapatan desa. Maka dari itu dalam praktek lapangannya BUMDes ini sulit dijalankan karena kurangnya pengetahuan serta dukungan dari masyarakat untuk BUMDes itu sendiri.

2. Resources (sumber daya) Yang termasuk sumber daya menurut George Edward III diantaranya adalah staf yang cukup serta memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan, informasi yang memadai dan relevan, dukungan dari lingkungan dan wewenang yang dimiliki. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan adalah kurang konsistennya dari yang menjalankan BUMDes ini ditambah lagi BUMDes ini hanya mengikuti trend saja dan tidak mengandalkan Sumber Daya yang ada sehingga terjadilah stagnansi dalam pelaksanaan di lapangannya.
3. Disposition or Attitude (sikap). Ada tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan, yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi kebijakan yang telah dibuat. Dari fenomena-fenomena yang ada kita dapat melihat bahwa masih ada tarik menarik khususnya antara institusi pemerintah desa dengan BUMDes desa itu sendiri. Hal ini diakibatkan karena masih adanya situasi Pandemi ini menjadikan titik focus dari pemerintahan desa ke hal tersebut.
4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi). Pelaksana suatu kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Salah satu kendala dalam pelaksanaan yaitu tidak melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan merujuk pada teori implementasi yang

dikemukakan oleh George Edward III maka factor yang paling dominan yang menyebabkan Kurangnya Upaya Peningkatan Produktivitas Desa Cijujung yaitu, Pengetahuan serta partisipasi masyarakat, sumber daya yang kurang serta kinerja dari orang – orang yang menjalankan BUMDes ini tidak konsisten. Kekurangan ini lah yang akhirnya menyebabkan Upaya ini tidak berhasil dan masih di taraf stagnansi atau tidak berjalan, maka dari itu tujuan dari BUMDes yang mensejahterakan perekonomian masyarakat di Desa Cijujung tidak terlaksana dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Upaya Peningkatan Produktivitas BUMDes Desa Cijujung Kabupaten Bogor Jawa Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Upaya Peningkatan Priduktivitas Desa Cijujung sudah dilakukan semenjak tahun 2014 dengan mendirikan usaha batu cincin, hingga caffe, namun dalam pelaksanaanya tidak berjalan dengan lancar karena usaha tersebut hanya mengikuti trend dan adanya situasi pandemic covid 19
- b) Dalam Penerapan Upaya Produktivitas BUMDes desa Cijujung ini mengalami berbagai macam kendala yaitu kurangnya pengetahuan dari masyrakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa akan BUMDes ini sendiri, kurangnya konsistensi dari pelaksana usaha, dan situasi Pandemi Covid-19
- c) BUMDes Desa Cijujung tidak mengalami peningkatan produktivitas dikarenakan tidak adanya usaha atau bisnis yang berjalan sehingga jika ingin mengaktifkan kembali diperluka adanya pengembangan atau penggarapan ide baru yang sudah dipaparkan seperti pendirian depo air mineral namun terhambat di dana yang membutuhkan dana sangat besar sedangkan dana dari pemerintahan desa tidak dapat turun sesuai dengan kebutuhan bumdes karena dialokasikan ke kegiatan penanggulangan bencana pandemic covid -19

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, Edy Yusuf dkk. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Universitas Diponegoro Semarang, Vol.13, No. 1 Maret
- Anshar (2013) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Coklat dalam Perspektek Ekonomi Syariah Di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negari Alauddin makassar.
- Darwita, I Kadekdan Dewa Nyoman Redana. 2018. Peranan Baadaan Usaha Milik Desa

(BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Lokus Majalah Ilmiah FISIP Vol. 9, No. 1-februari

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpbb8358af48full.pdf>

<https://blog.bumdes.id/2017/10/kumpulan-file-bumdes-id/>

Ibrahim.2018. Manajemen Badan Usaha Milik Desa. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nasution., (1992). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Penerbit Tarsito.

Rangkuti, F., (2016). Teknik Membedakan Kasus Bisnis Analisis SWOT. Jakarta : PT Gramedia.

Sudirga, S. K. (2012). Pemanfaatan Tumbuhan sebagai Obat Tradisional di Desa Trunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Bumi Lestari